

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR  
DAN PERANANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI (Tahun 1987 - 2001)**

**SKRIPSI**



Oleh

**ERNA DWI HASTUTI**

**NIM : 00 313 154**

**Jurusan : Ekonomi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2005**

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR  
DAN PERANANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI (Tahun 1987-2001)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas  
Ekonomi jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan**



**Oleh**

**ERNA DWI HASTUTI**

**NIM : 00 313 154**

**Jurusan : Ekonomi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2005**

## HALAMAN PENGESAHAN

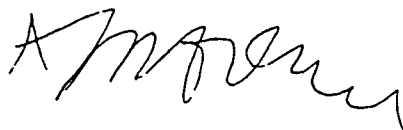
### **Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Dan Peranannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri (Tahun 1987-2001)**

Nama : Erna Dwi Hastuti  
NIM : 00 313 154

Yogyakarta, Januari 2005

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dra. Indah Susantun, M.Si

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DAN PERANANNYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI (TAHUN 1987 – 2001)**

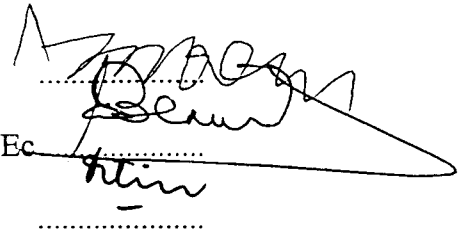
**Disusun Oleh: ERNA DWI HASTUTI  
Nomor mahasiswa: 00313154**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal: 14 Februari 2005

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Indah Susantum, M.Si


Penguji I : Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec

Penguji II : Dra. Ari Rudatin, M.Si



.....  
.....  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

## HALAMAN MOTTO

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami  
kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami,  
dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya  
Engkau Maha pemberi petunjuk.

(Ali Imran : 8)

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu  
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang  
yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman

(Ali Imron : 200)

Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu  
maka Allah memudahkan jalan ke surga

(HIR. Muslim)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Seiring rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk:*

- ∞ Ananda *Nadia Hasna Azzahra*, mutiaraku yang selalu membuatku merasa bangga, mendatangkan keberuntungan, memberikan inovasi dan motivasi sehingga membuatku sampai tingkatan ini.
- ∞ Suamiku tercinta yang lahir batin terlibat menentukan penyelesaian studi ini.
- ∞ Ayahanda dan Ibundaku tersayang serta kedua mertua yang selalu berdoa untukku.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DAN PERANANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI (Tahun 1987-2001)"**. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi besar hingga akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umat manusia kepada fitrah yang benar dan jalan yang lurus.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang dihaturkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Widardjono, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, mudah-mudahan dibawah kepemimpinannya semakin maju dan terus berkembang.
3. Ibu. Dra. Indah Susantun, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan, bimbingan dan motivasi, hingga selesainya skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi.

5. Pimpinan dan seluruh karyawan Bappeda, BPKD, Kesbang dan Linmas, BPS, Dinas Pasar dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri, yang telah memberi ijin serta banyak membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman mahasiswa Fakultas ekonomi - UII Yogyakarta yang turut memberikan saran dan dukungannya demi selesainya penulisan skripsi ini.
7. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan karunia dan menjadikan amal ibadah yang mulia. Akhirnya segala yang benar itu dari Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT.

**Wassalamua'alaikum Wr.Wb**

Yogyakarta, 14 Februari 2005

Penulis

**Erna Dwi Hastuti**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....	8
2.1. Diskripsi Lokasi Penelitian .....	8
2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri .....	12

2.3 Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri .....	20
BAB III TELAAH PUSTAKA .....	28
BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS.....	32
4.1 Pendapatan Asli Daerah .....	32
4.2 Pengertian Retribusi .....	33
4.3 Retribusi Daerah .....	35
4.4 Jenis dan Penetapan Tarif Retribusi .....	37
4.5 Asas-asas Pemungutan Retribusi .....	39
4.6 Pengertian Pasar .....	40
4.7 Pengertian Retribusi Pasar .....	42
4.8 Obyek Retribusi Pasar .....	43
4.9 Subyek Retribusi Pasar .....	44
4.10 Penagihan Retribusi Pasar .....	44
4.11 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar .....	46
4.12 Hubungan Retribusi Pasar dengan PAD .....	47
4.13 Hipotesis .....	50
BAB V METODE PENELITIAN .....	51
5.1 Lokasi Penelitian .....	51
5.2 Jenis Data .....	51
5.3 Definisi Variabel .....	51
5.4 Teknik Analisa Data .....	52

1. Analisa Regresi .....	52
A. Model Empirik .....	52
B. Rencana Analisis .....	53
C. Uji Asumsi Klasik .....	55
2. Analisa Ratio .....	59
BAB VI ANALISIS DATA .....	60
6.1 Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pedagang dan PDRB per kapita terhadap retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri .....	60
6.1.1 Analisis Regresi .....	60
6.1.2 Uji t-statistik .....	62
6.1.3 Uji F-Statistik .....	64
6.1.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64
6.1.5 Uji Asumsi Klasik .....	66
6.2 Peran retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..	69
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
7.1 Kesimpulan .....	72
7.2 Saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Wonogiri Tahun 1987- 2001 dan kenaikan per Tahunnya .....	4
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Pedagang dan PDRB per kapita Tahun 1987 s/d 2001 di Kabupaten Wonogiri .....	11
Tabel 6.1 Hasil Regresi antara variabel independen (jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita) terhadap variabel dependen (Retribusi Pasar) .....	61
Tabel 6.2 Pengujian Variabel independen dengan uji t-statistik .....	62
Tabel 6.3. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 1987 sampai dengan 2001 di Kabupaten Wonogiri .....	70

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Skema Kerangka Pemikiran .....	49
Gambar 5.1 Statistik d Durbin – Watson .....	57
Gambar 6.1 Uji satu sisi parameter variabel jumlah penduduk .....	62
Gambar 6.2 Uji satu sisi parameter variabel jumlah pedagang .....	63
Gambar 6.3 Uji satu sisi parameter variabel PDRB per kapita .....	64
Gambar 6.4 Hasil Analisis Statistik d Durbin–Watson .....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Data Penelitian

Lampiran 2. Hasil Regresi

Lampiran 3. Tabel t

Lampiran 4. Tabel F 5 %

Lampiran 5. Surat Rekomendasi Research/Survey

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah memberikan konsekuensi logis kepada seluruh jajaran pemerintahan akan perlunya perhatian yang lebih serius tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam tatanan konsepsi demokrasi dan desentralisasi. Disisi lain sejalan dengan jiwa dan semangat reformasi di bidang pemerintahan daerah, maka prinsip otonomi yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diterapkan sejalan dengan upaya penyelenggaraan *Good Governance*, yang pada dasarnya meliputi: transparansi, partisipasi dan pelayanan publik dalam pembangunan daerah.

Adanya semangat reformasi tersebut mengindikasikan keinginan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki guna membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.

Dalam hal pembiayaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu: fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Dari ketiga fungsi ini, fungsi alokasi yang mencakup pengelolaan sumber daya dan pelayanan

publik lebih tepat dan efektif apabila dilaksanakan oleh daerah. Masalah pembiayaan ini menjadi isu strategis yang selalu diperdebatkan ketika kedua undang-undang tersebut mulai diberlakukan. Disisi lain pemberlakuan otonomi daerah akan menjadi permasalahan yang harus disikapi pemerintah daerah, baik dari aspek penerimaan, pembiayaan termasuk aspek pelayanannya.

Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Dapat dikatakan bahwa PAD merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Sedangkan menurut UU No. 25/1999 pasal 4, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a). Pajak daerah
- b). Retribusi daerah



- c). Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lain yang dipisahkan.
- d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Retribusi daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu retribusi daerah harus dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka optimalisasi dan usaha peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek retribusi daerah. Retribusi daerah dipungut hanya bila masyarakat menggunakan barang atau fasilitas milik negara, misalnya pasar, dimana pedagang membayar retribusi kepada pemerintah hanya bila pedagang tersebut menggunakan fasilitas milik negara seperti toko/ kios yang telah disediakan oleh pemerintah.

Dari berbagai pajak daerah dan retribusi daerah, salah satu yang cukup menonjol adalah penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar dipungut berdasarkan kondisi pasar dan fasilitasnya yang disediakan pemerintah daerah. retribusi pasar sebagai salah satu jenis retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup berarti kepada retribusi daerah.

Tabel 1.1 Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Wonogiri Tahun 1987-2001 dan Kenaikan per Tahunnya.

Tahun	Penerimaan Retribusi Pasar (rupiah)	Kenaikan Per Tahun (%)
1987	217.720.874	-
1988	335.019.896	53
1989	370.000.000	10
1990	377.659.547	2
1991	435.759.882	15
1992	480.950.418	10
1993	552.964.387	14
1994	605.540.995	9
1995	663.398.131	9
1996	767.754.840	15
1997	825.923.725	7
1998	840.520.925	2
1999	891.727.515	6
2000	975.629.350	9
2001	1.053.679.690	8

Sumber : Kabupaten Wonogiri Dalam Angka Tahun 1987 s/d 2001, Bappeda dan BPS Kabupaten Wonogiri.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kenaikan retribusi pasar di Kabupaten Wonogri per tahun sangat bervariasi. Terjadi kenaikan paling besar yaitu sebesar 53 % pada tahun 1988, kenaikan 15% pada tahun 1991 dan 1996 tetapi pada tahun-tahun berikutnya hanya terjadi kenaikan  $\leq 10\%$ . Bahkan pada tahun 1990 dan 1998 hanya terjadi kenaikan sebesar 2%. Kenyataan ini sangat menyedihkan mengingat retribusi pasar merupakan salah satu sumber

pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri. Berkaitan dengan hal ini, penulis mengambil judul skripsi: ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DAN PERANANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI (Tahun 1987-2001).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk memberikan arahan pada penelitian dan analisis data, perlu adanya perumusan masalah yang jelas. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri ?
3. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri ?
4. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri ?
5. Bagaimana kecenderungan peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri tahun 1987-2001 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri.
- b. Untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri.
- c. Untuk menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri.
- d. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri
- e. Untuk mengetahui kecenderungan peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri tahun 1987-2001.

### **1.4 Manfaat penelitian**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada instansi terkait untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, khususnya bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai aplikasi dari teori-teori yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 7 bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara umum atas daerah penelitian.

### BAB III TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

### BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

### BAB V METODE PENELITIAN

Bab ini membahas ruang lingkup penelitian, jenis data, definisi variabel, dan Teknik analisa data.

### BAB VI ANALISIS DATA

Bab ini pertama, membahas pengaruh berbagai karakteristik pasar terhadap penerimaan retribusi pasar. Kedua, membahas peran retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah

### BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang sesuai dengan permasalahan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

#### 2.1 Diskripsi Lokasi Penelitian

##### a. Letak Geografis

Secara astronomis Kabupaten Wonogiri terletak pada  $7^{\circ} 32' - 8^{\circ} 15'$  Lintang Selatan;  $110^{\circ} 41' - 111^{\circ} 18'$  Bujur Timur, dimana keadaan alamnya sebagian besar terdiri dari pegunungan yang berbatu gamping (Kawasan Karst), terutama di bagian selatan, termasuk jajaran Pegunungan Seribu yang merupakan mata air dari Bengawan Solo.

Secara administratif terletak di wilayah paling selatan Propinsi Jawa Tengah termasuk dalam Karesidenan Surakarta dengan jarak jauh ke kota Karesidenan 32 Km dan dari ibukota Propinsi sejauh 133 Km.

##### b. Luas Wilayah Administratif

Luas wilayah Kabupaten Wonogiri menurut Evaluasi Penggunaan Tanah sensus pertanian adalah seluas 182.236,0236 Ha atau  $\pm 5,5$  % luas wilayah Propinsi Jawa Tengah, dimana menurut jenis penggunaannya yang paling dominan adalah tanah tegal seluas 61.131 Ha atau 33,54 % disusul kemudian tanah pekarangan/ bangunan 36.775 Ha atau 20,18 %, kemudian berturut-turut dalam prosentase adalah tanah sawah 16,62 %; hutan negara 10,02 %; hutan rakyat 8,29%, dan lain-lain 11,35 %.

Secara umum Kabupaten Wonogiri beriklim tropis yang mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan kemarau dengan temperatur

rata-rata 24 ° – 32 ° C menurut data Kabupaten Wonogiri dalam angka tahun 2003, jumlah hari hujan dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April 2003 dengan jumlah hari hujan selama 450 hari dengan curah hujan sebesar 10.124 mm.

c. Batas Daerah

Wilayah Kabupaten Wonogiri berbatasan dengan wilayah-wilayah :

- Sebelah selatan : Kabupaten Pacitan (Jatim) dan Samudra Indonesia.
- Sebelah utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah timur : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo (Jatim).
- Sebelah barat : Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

d. Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Wonogiri secara administratif dibagi menjadi :

1. 25 Wilayah Kecamatan
2. 251 Desa
3. 43 Kelurahan

Jarak jauh antara kota Kecamatan dan ibukota kabupaten, yang terdekat adalah Kecamatan Wonogiri sebagai ibukota Kabupaten dan yang terjauh adalah Kecamatan Paranggupito yaitu sejauh 68 Km.

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

Kegiatan perekonomian Kabupaten Wonogiri tidak hanya terkonsentrasi pada sektor yang dominan, melainkan saling mendukung

antar sektor. Pada kenyataannya memang sektor pertanian dan sektor perdagangan yang menjadi primadona dan pendukung utama, masing-masing sektor memberikan kontribusi yang sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian dan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Wonogiri.

Pertumbuhan ekonomi dari tahun 1987-2001 bila dilihat melalui angka PDRB per kapita selalu mengalami peningkatan meski tidak begitu besar. Sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB per kapita Kabupaten Wonogiri, disusul dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

f. Penduduk

Data yang bersumber BPS tahun 2003 tercatat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri adalah 1.121.670 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk perempuan adalah 568.676 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki adalah 567.125 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan ternyata lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki, meskipun perbedaannya relatif sangat kecil. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1998 yang sebesar 1.095.042 jiwa, maka selama kurun waktu tersebut tingkat pertumbuhannya hanya sebesar 0,68 %.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri adalah sebesar 610 jiwa/km<sup>2</sup>, jauh di bawah tingkat kepadatan penduduk Propinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 919 jiwa / km<sup>2</sup> (tahun 2001).



Mata pencaharian penduduk Wonogiri jika diperinci menurut untuk usia 10 tahun ke atas, yang paling dominan adalah petani sendiri sebanyak 206.591 dan buruh tani sebanyak 137.740, sehingga jika dijumlahkan, maka yang bermata pencaharian petani merupakan jumlah penduduk paling besar yaitu sebesar 344.331 atau sebesar 43,12 %, urutan berikutnya adalah buruh bangunan dan industri 10,63 % dan pedagang sebesar 4,01 %.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Pedagang dan PDRB per kapita Tahun 1987 s/d 2001 di Kabupaten Wonogiri.

No	Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Pedagang (orang)	PDRB per kapita (rupiah)
1.	1987	1008662	6360	289663
2.	1988	1014282	6436	322664
3.	1989	1018625	6520	374668
4.	1990	1025964	6645	426001
5.	1991	1033759	6786	489640
6.	1992	1039118	6985	587453
7.	1993	1047460	7105	595059
8.	1994	1053657	7357	724396
9.	1995	1060829	7552	841623
10.	1996	1080998	7877	982423
11.	1997	1087645	8828	1081111
12.	1998	1095042	8966	1603375
13.	1999	1103073	9459	1864024
14.	2000	1111197	9623	2063170
15.	2001	1117869	10301	2245387

Sumber : PDRB dan Kabupaten Wonogiri Dalam Angka Tahun 1987-2001, Bappeda dan BPS Kabupaten Wonogiri.

## **2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri**

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 278 Tahun 2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang uraian tugas pejabat Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri, di mana Dinas Pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang pengelolaan pasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pasar mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Merumuskan perencanaan strategik (Renstra) Dinas Pasar sebagai penjabaran lebih lanjut dan menjadi bagian dari perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi ;
- b. Menjabarkan kebijakan Bupati berupa disposisi maupun petunjuk lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya ;
- c. Mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional ;

- d. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ;
- e. Memeriksa hasil kerja pejabat dibawahnya melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya ;
- f. Melakukan koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya ;
- g. Merumuskan kebijakan Dinas Pasar sebagai tindaklanjut kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati) sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas lebih lanjut ;
- h. Merumuskan pemecahan masalah yang timbul dibidang pengelolaan pasar sebagai akibat kesalahan secara administratif, teknis maupun sebagai dampak suatu kebijakan agar sesuai dengan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ;
- i. Melakukan pembinaan teknis dan administratif kepada unit-unit kerja dibawahnya (termasuk cabang dinas) melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan misi organisasi sampai tingkat unit kerja terendah ;

- j. Melakukan penerbitan dan pengawasan pelaksanaan ijin dibidang pasar sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya;
- k. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) Dinas Pasar setiap akhir tahun kepada Bupati sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
- l. Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

## 2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha Dinas Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja bagian tata usaha Dinas Pasar agar dapat digunakan sebagai acuan kerja unit kerja dibawahnya ;
- b. Menjabarkan perintah dan kebijakan atasan baik berupa disposisi maupun petunjuk lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya ;
- c. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat ;

- d. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya ;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya ;
- g. Mengkoordinasikan penyiapan bahan guna penyusunan perencanaan strategik (Renstra) Dinas Pasar yang berasal dari sub dinas lain sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku ;
- h. Mengarahkan disposisi dan perintah tertulis pimpinan kepada sub dinas yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional ;
- i. Menyelenggarakan fasilitasi kepada sub dinas lainnya dalam urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan hubungan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ;
- j. Mengkoordinasikan penyiapan bahan guna penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIP) dan laporan lainnya dari masing-masing sub dinas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku agar dapat tersusun laporan secara sepat, tepat dan akurat ;

- k. Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah ;
  - l. Menilai prestasi bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya ;
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
3. Sub Dinas Penerimaan Pasar
- a. Menyusun program kerja Sub Dinas Penerimaan Pasar sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik Dinas Pasar agar dapat digunakan sebagai acuan kerja ;
  - b. Menjabarkan perintah dan kebijakan atasan baik berupa disposisi maupun petunjuk lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya ;
  - c. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat ;
  - d. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya ;
  - e. Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya ;
  - f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya ;

- g. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Sub Dinas Penerimaan Pasar secara rinci dan jelas guna memudahkan operasionalisasi dan penyelenggaraan lebih lanjut ;
- h. Menyiapkan bahan dibidang penerimaan pasar guna menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang berupa Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas Pasar sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Menyiapkan bahan guna penyelesaian suatu permasalahan yang timbul dibidang penerimaan pasar sebagai akibat kesalahan secara administratif, teknis maupun dampak kebijakan agar sesuai misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ;
- j. Menyusun laporan realiasi program kerja Sub Dinas Penerimaan Pasar secara berkala kepada atasan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) Dinas Pasar ;
- k. Melakukan pembinaan teknis kepada cabang dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
- l. Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah dan pengambilan keputusan ;
- m. Menilai prestasi bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya ;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Sub Dinas Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar
  - a. Menyusun program kerja Sub Dinas Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik Dinas Pasar agar dapat digunakan sebagai acuan kerja :
  - b. Menjabarkan perintah dan kebijakan atasan baik berupa disposisi maupun petunjuk lisan secara rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya ;
  - c. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat ;
  - d. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya ;
  - e. Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya ;
  - f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya ;
  - g. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Sub Dinas Penerimaan Pasar secara rinci dan jelas guna memudahkan operasionalisasi dan penyelenggaraan lebih lanjut ;
  - h. Menyiapkan bahan dibidang penerimaan pasar guna menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang berupa Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas Pasar sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;



- i. Menyiapkan bahan guna penyelesaian suatu permasalahan yang timbul dibidang pemeliharaan dan pengembangan pasar sebagai akibat kesalahan secara administratif, teknis maupun dampak kebijakan agar sesuai misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ;
  - j. Menyusun laporan realiasi program kerja Sub Dinas Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar secara berkala kepada atasan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pegawai Dinas Pasar ;
  - k. Melakukan pembinaan teknis kepada cabang dinas sesuai dengan bidang tugasnya ;
  - l. Memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah dan pengambilan keputusan ;
  - m. Menilai prestasi bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya ;
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
5. Cabang Dinas
- a. Membuat program kerja sesuai bidang dan tanggungjawab Dinas Pasar sesuai potensi yang ada di masing-masing wilayah kerja Cabang Dinas;
  - b. Menjabarkan dan melaksanakan perintah ataupun kebijakan Kepala Dinas Pasar;

- c. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan dan sekaligus memberi petunjuk serta arahan kepada bawahan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan memantau pelaksanaan kegiatan pekerjaan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain ditingkat Cabang Dinas;
- g. Menyusun laporan realiasi program kerja yang telah dilaksanakan secara berkala kepada atasan;
- h. Memberikan usul dan saran kepada atasan sebagai bahan mengambil kebijaksanaan;
- i. Menyiapkan bahan guna penyelesaian suatu permasalahan yang timbul ditingkat Cabang Dinas sebagai akibat kesalahan administrasi, teknis maupun dampak kebijaksanaan agar sesuai misi, tujuan dan sasaran dinas.

### **2.3 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonogiri**

Tata cara pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999 dengan cara pemungutan secara langsung menggunakan sistem Benda Berharga yang berupa karcis atau dengan sistem *Official Assesment*, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Pasar selaku penanggung jawab ketertiban pasar dan penarikan retribusi pasar daerah.

2. Kepala Pasar dalam menjalankan tugas melaksanakan pemungutan retribusi pasar dibantu oleh beberapa orang petugas pelaksana yang dalam melaksanakan penarikan memakai pakaian seragam dan tanda pengenal yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
3. Pemungutan dilakukan secara harian oleh petugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Pasar.
4. Besarnya tarif retribusi pasar sesuai dengan tarif yang diterapkan dalam Peraturan Daerah yang berlaku saat pemungutan dilakukan.
5. Hasil dari pemungutan retribusi pasar disetorkan ke Kas Daerah secara harian oleh Bendahara Khusus Penerima (BKP).
6. Kepada petugas pelaksana diberikan biaya operasional yang besarnya diatur oleh Bupati Kepala Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri.

Penggolongan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- (1) Pasar dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
  - a. Pasar Daerah;
  - b. Pasar Desa bersubsidi;
  - c. Pasar Desa tidak bersubsidi.
- (2) Pasar Daerah dapat digolongkan dalam 4 (empat) kelas, yaitu :
  - a. Pasar Kelas IA;
  - b. Pasar Kelas IB;
  - c. Pasar Kelas II;

d. Pasar Kelas III.

(3) Yang termasuk Pasar Daerah adalah :

- a. Kelas IA ialah : 1. Pasar Wonogiri Kota.  
2. Pasar Baturetno.  
3. Pasar Jatisrono.
- b. Kelas IB ialah : 1. Pasar Purwantoro.  
2. Pasar Slogohimo.  
3. Pasar Sidoharjo.  
4. Pasar Girimarto.  
5. Pasar Jatiroto.  
6. Pasar Pracimantoro.  
7. Pasar Wuryantoro.  
8. Pasar Eromoko.  
9. Pasar Manyaran.  
10. Pasar Tirtomoyo.  
11. Pasar Ngadirojo.
- c. Kelas II ialah : 1. Pasar Giriwoyo.  
2. Pasar Nguntoronadi.  
3. Pasar Krisak.  
4. Pasar Sidorejo.  
5. Pasar Wonokarto.  
6. Pasar Bulukerto.  
7. Pasar Puhpelem.

- d. Pasar Kelas III : 1. Pasar Giritontro.  
 2. Pasar Giribelah.  
 3. Pasar Batuwarno.  
 4. Pasar Jatipurno.  
 5. Pasar Kismatoro.  
 6. Pasar Tengger.  
 7. Pasar Selogiri.

(4) Semua pasar desa disamakan dengan pasar kelas III.

Waktu pemakaian pasar ditentukan setiap hari dibuka mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Pasar dapat pula dibuka pada malam hari sampai dengan pukul 24.00 WIB atas persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Besarnya tarif pemakaian tempat di pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (4), ditetapkan tarif per meter persegi setiap hari buka ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Kelas I A – 1 :

- a.1. Kios : - Permanen
- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tipe A .....          | Rp. 125,00 |
| Tipe B .....          | Rp.100,00  |
| Tipe C .....          | Rp. 75,00  |
| - Semi Permanen ..... | Rp. 50,00  |
- a.2. Los : - Permanen ..... Rp.150,00  
 - Semi Permanen .... Rp.100,00
- a.3. Pelataran : ..... Rp.100,00

- b. Pasar Kelas I A – 2 :
- b.1. Kios : - Permanen
    - Tipe A ..... Rp.100,00
    - Tipe B ..... Rp. 75,00
    - Tipe C ..... Rp. 50,00
    - Semi Permanen .... Rp. 45,00
  - b.2. Los : - Permanen ..... Rp.125,00
    - Semi Permanen .... Rp.100,00
  - b.3. Pelataran : ..... Rp.100,00
- c. Kelas I B :
- c.1. Kios : - Permanen
    - Tipe A ..... Rp. 75,00
    - Tipe B ..... Rp. 50,00
    - Tipe C ..... Rp. 45,00
    - Semi Permanen ... Rp. 40,00
  - c.2. Los : - Permanen ..... Rp.100,00
    - Semi Permanen ... Rp. 75,00
  - c.3. Pelataran : ..... Rp. 75,00
- d. Pasar Kelas II :
- d.1. Kios : - Permanen
    - Tipe A .....Rp. 50,00
    - Tipe B .....Rp. 45,00
    - Tipe C .....Rp. 45,00

- Semi Permanen ....Rp. 35,00
- d.2. Los : - Permanen ..... Rp. 50,00
  - Semi Permanen ... Rp. 50,00
- d.3. Pelataran : ..... Rp. 50,00
- e. Pasar Kelas III :
- e.1. Kios : - Permanen
  - Tipe A .....Rp. 45,00
  - Tipe B .....Rp. 40,00
  - Tipe C .....Rp. 35,00
  - Semi Permanen ..... Rp. 30,00
- e.2. Los : - Permanen .....Rp. 50,00
  - Semi Permanen ..... Rp. 50,00
- e.3. Pelataran : ..... Rp. 50,00

Ayat (5) untuk mengatur bagi pedagang yang menetap dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dikenakan biaya :

- Kios Pasar :

1. Pasar Kelas I A-1 sebesar Rp. 30.000,00
2. Pasar Kelas I A-2 sebesar Rp. 27.500,00
3. Pasar Kelas I B sebesar Rp. 25.000,00
4. Pasar Kelas II sebesar Rp. 12.500,00
5. Pasar Kelas III sebesar Rp. 6.000,00

- Los Pasar :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Pasar Kelas I A-1 sebesar | Rp. 7.500,00 |
| 2. Pasar Kelas I A-2 sebesar | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pasar Kelas I B sebesar   | Rp. 4.000,00 |
| 4. Pasar Kelas II sebesar    | Rp. 3.000,00 |
| 5. Pasar Kelas III sebesar   | Rp. 1.500,00 |

Ayat (6) untuk mengatur bagi pedagang baru yang akan menetap pada los atau plataran dikenakan biaya :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| - Los Pasar sebesar      | Rp. 50.000,00 |
| - Plataran pasar sebesar | Rp. 25.000,00 |

Ayat (7) mengatur perihal pemindahan tanda penghuni/ijin dikenakan biaya sebesar satu persen dari harga pada saat terjadinya transaksi atau tafsiran harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Ayat (8) untuk mengatur bagi para pedagang yang lokasi usahanya berada dalam radius atau jarak 1.000 dari batas pasar dikenakan biaya :

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Pasar Kelas I A-1 sebesar | Rp. 500,00 |
| 2. Pasar Kelas I A-2 sebesar | Rp. 400,00 |
| 3. Pasar Kelas I B sebesar   | Rp. 300,00 |
| 4. Pasar Kelas II sebesar    | Rp. 200,00 |
| 5. Pasar Kelas III sebesar   | Rp. 100,00 |



Ayat (9) untuk mengatur bagi ternak yang memakai tempat di pasar dikenakan biaya :

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Kerbau, sapi, kuda, babi      | Rp. 2.000,00 |
| 2. Anak kerbau, sapi, kuda, babi | Rp. 1.000,00 |
| 3. Kambing                       | Rp. 300,00   |
| 4. Ayam                          | Rp. 100,00   |

Ayat (10) mengatur bagi kendaraan yang menaikkan atau menurunkan hewan di lokasi pasar dikenakan biaya :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Truk sebesar    | Rp. 1.000,00 |
| 2. Pick up sebesar | Rp. 500,00   |

### **BAB III**

#### **TELAAH PUSTAKA**

Penelitian tentang retribusi secara umum telah banyak dilakukan oleh para peneliti, demikian juga tentang penelitian retribusi pasar. Berdasar pada penelitian sebelumnya yang mendasari dan menjadi pertimbangan penulis dalam menyusun skripsi ini, adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh:

1. Mulyani (1995) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Peranan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya peranan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui apakah pungutan retribusi pasar di daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri sudah efektif, efisien dan ekonomis, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh DIPENDA Tingkat II Kabupaten Wonogiri dalam usahanya meningkatkan retribusi pasar.

Data yang digunakan berupa data runtut waktu yaitu data retribusi pasar dan data pendapatan asli daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu mulai tahun 1990 sampai dengan 1994.

Selain metode kualitatif sebagai analisis dalam penelitian ini, metode kuantitatif yang digunakan berupa analisis regresi, analisis efisiensi, efektivitas, ekonomis, analisis SWOT dan analisis elastisitas, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa retribusi pasar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan yang mempunyai elastisitas sebesar 0,71. Berarti apabila terdapat kenaikan retribusi pasar sebesar 10 persen, maka pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 7,1 persen pada level of significant 5 %. Jadi dari kenyataan diatas dapat dikatakan bahwa antara retribusi pasar dengan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang searah. Kecenderungan ini nampak karena semakin efektifnya pemungutan retribusi pasar kepada para pedagang sehingga memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah semakin besar. Nilai  $R^2 = 0,7441$  menunjukkan besarnya proporsi sumbangan dari retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 74,41 %, dengan demikian hanya 25,59 % dijelaskan oleh variabel lain yang belum tercakup dalam model.
- b. Dari segi efisiensi, pemungutan retribusi pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri semakin efisien dari tahun ke tahun. Hal ini karena penerimaannya yang selalu lebih besar dibandingkan peningkatan biaya pungutnya. Kecenderungan ini menunjukkan semakin baiknya sistem pemungutan retribusi pasar.
- c. Dari segi efektifitas, pemungutan retribusi pasar dapat dikatakan efektif dari tahun ketahun, hal ini ditunjukkan denganselalu terlaksananya target.
- d. Dari segi ekonomis, penelitian ini menghasilkan elastisitas yang semakin membaik dari tahun ketahun. Hasil ini memperlihatkan bahwa produk Domestik Regional memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan retribusi pasar. Hal ini memperlihatkan bahwa hasil produksi

di Kabupaten Dati II Wonogiri semakin meningkat dan banyak dijual melalui pasar, sehingga mampu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah melalui retribusi pasar.

- e. Dari hasil analisis SWOT dapat disimpulkan, kelebihan yang dimiliki adalah retribusi pasar memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah, akan tetapi dari segi administrasinya masih lemah yaitu sulitnya mengontrol karcis yang terjual sesungguhnya setiap hari.
2. Widayatto (2002) dalam penelitiannya berjudul *Peran Retribusi Rekreasi Obyek Wisata Gajah Mungkur terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel biaya promosi pariwisata dan PDRB terhadap besarnya penerimaan retribusi rekreasi obyek wisata Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri, serta untuk mengetahui kecenderungan peran retribusi rekreasi obyek wisata Gajah Mungkur terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 1988-2001.

Data yang digunakan berupa data runtut waktu yaitu data biaya promosi pariwisata, PDRB per kapita, data pendapatan asli daerah dengan jangka waktu 14 (empat belas) tahun, yaitu mulai tahun 1988 sampai dengan 2001. Regresi linier berganda dan analisis ratio menjadi model utama terpilih dalam penelitian ini. Setelah lolos dari uji statistik dan uji ekonometrika (uji asumsi klasik) dapat disimpulkan; pertama, biaya promosi pada elastisitas 4.203 ( $\alpha = 1\%$ ) dan PDRB pada elastisitas 74.906 ( $\alpha = 5\%$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi rekreasi. Secara akumulatif

menunjukkan bahwa koefisien determinasi  $R^2 = 0,983$  artinya 98,3 % variabel retribusi rekreasi dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya, sedangkan sisanya (1,7 %) dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Kedua, hasil analisis ratio menunjukkan retribusi rekreasi telah memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap PAD.

Dari kedua penelitian diatas, diketahui bahwa besarnya kontribusi retribusi, baik pariwisata dan pasar sangat mempengaruhi besarnya PAD, demikian juga yang diharapkan dari retribusi pasar yang menjadi penekanan dalam penelitian ini. Dari sisi yang saling berkaitan, PDRB per kapita adalah salah satu tolok ukur dalam menggambarkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dapat dilihat dari besarnya produk domestik regional bruto. Besarnya nilai PDRB per kapita sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki. Semakin besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi, ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

## **BAB IV**

### **LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

#### **4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dan digali dari daerah itu sendiri, Sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Adapun sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Daerah sebagai badan hukum yang mempunyai otonomi daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam usaha menggali sumber-sumber pada daerah tersebut, daerah berupaya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai ketentuan pasal 79 huruf a, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah terdiri atas :

- a). Hasil pajak daerah, adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Pajak daerah diperoleh sebagian besar dari tujuh jenis pajak, yaitu : pajak tontonan, pajak pembangunan

atas hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, pajak pendaftaran perusahaan, pajak reklame, pajak potong hewan dan pajak warga asing.

- b). Hasil retribusi daerah, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Macam-macam retribusi yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah, misalnya ijin mendirikan bangunan, retribusi rekreasi, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi kebersihan sampah, retribusi parkir dan lain-lain.
- c). Hasil laba perusahaan daerah, adalah bagian laba perusahaan daerah misalnya Bank Pembangunan Daerah, perusahaan air minum dan sebagainya.
- d). Lain-lain pendapatan asli daerah sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro.

#### **4.2 Pengertian Retribusi**

Terdapat dua karakteristik yang penting dalam retribusi (menurut Adolf Waqner C.Goedhart, 1973:94) yaitu:

- a. Adanya sifat kontraprestasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh negara.
- b. Prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik negara.

Disamping itu ada beberapa pengertian tentang retribusi, yaitu :

1. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (Bachrul Elmi, dikutip oleh Abdul Halim 2000:52).
2. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko, 2002:85).
3. Retribusi adalah penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat dalam hubungannya yang bersifat publik (Soetrisno PH, 1981:202), dapat diartikan sebagai dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada negara dimana bisa dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (Suparmoko 1987:94).
5. Retribusi adalah pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seorang atau suatu badan karena jasa yang nyata dari pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1957 dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan pengertian retribusi sebagai berikut :

” Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena masyarakat memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah”.



Dalam pasal 5 peraturan umum retribusi daerah (Agus Salim Nasution, 1986:26-28) disebutkan bahwa pengenaan retribusi daerah harus memenuhi azas-azas sebagai berikut:

- a. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang keluar maupun ke dalam daerah. Ketentuan ini maksudnya bahwa pungutan retribusi jangan sampai memperberat biaya barang yang mau masuk atau keluar dari daerah pungutan retribusi.
- b. Dalam peraturan retribusi daerah tidak diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan agama.

#### **4.3 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah salah satu bagian dari pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Menurut undang-undang darurat tersebut, retribusi daerah adalah pungutan sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa yang nyata dari pemerintah daerah. Jasa tersebut dapat berupa jasa pekerjaan, jasa atas usaha atau milik daerah, dan jasa lainnya, termasuk jasa ijin dalam rangka pengendalian, yang secara langsung memberi manfaat bagi pemakai dan memberi manfaat secara umum bagi masyarakat. Pungutan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tarif yang dikenakan, kualitas dan kuantitas jasa pelayanan yang diberikan, dan tuntutan kebutuhan masyarakat atas jasa pelayanan tersebut. Selanjutnya untuk

pelaksanaan di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah. Adapun yang merupakan lapangan retribusi daerah adalah:

- Retribusi uang legas;
- Retribusi uang tol, bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan;
- Retribusi uang sepadan dan pemeriksaan;
- Retribusi atas pemakaian tanah;
- Retribusi penguburan;
- Retribusi pengerukan kakus;
- Retribusi pemberian izin pengusaha perindustrian kecil;
- Retribusi pelelangan ikan;
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- Retribusi jembatan timbang;
- Retribusi stasiun bus, taksi dan lain-lain;
- Retribusi tempat rekreasi;
- Retribusi balai pengobatan;
- Retribusi pesanggrahan;
- Retribusi atas pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut;
- Retribusi pemeriksaan air susu;
- Retribusi parkir;
- Retribusi pasar;
- Dan lain-lain.

Retribusi daerah merupakan penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, karena retribusi memiliki keunggulan dalam kemudahan pemungutan dan penetapannya dibandingkan dengan pajak. Hal ini disebabkan pemungutan retribusi berdasarkan kontra prestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif seperti pajak. Kelebihan tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola retribusi, sehingga perolehan pendapatan dari sektor retribusi seringkali lebih besar dari pada sektor pajak.

Suparmoko (1987:94) retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat secara langsung adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Sedangkan menurut pengertian dari pasal 18 UU No. 18 Tahun 1997, retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, jadi retribusi daerah dibayar secara langsung oleh yang mengkonsumsi jasa atau membayar ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

#### **4.4 Jenis dan Penetapan Tarif Retribusi**

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997 tentang jenis retribusi disebutkan dalam pasal 18 jenis retribusi digolongkan menjadi 3 adalah sebagai berikut:

a. **Jasa Umum**

Jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum.

b. Jasa Usaha

Jasa yang disediakan pemerintah dengan menganut prinsip komersial.

c. Perizinan Tertentu

Perizinan yang diberikan pemerintah untuk tujuan pembinaan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut (Deddy Supriadi Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001:284) :

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan pemerintah daerah yang mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.
2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

#### 4.5 Asas-asas Pemungutan Retribusi

- a). Adanya dasar hukum yang mengatur pemungutan retribusi yang ditetapkan pemerintah yaitu perda tentang retribusi yang bersangkutan, hal ini bahwa sebelum diadakan pemungutan pajak atau retribusi kepada rakyat harus diselenggarakan dengan persetujuan DPR / DPRD sebagai lembaga legislatif, sehingga pemberian beban kepada rakyat tersebut telah melalui wakil-wakil rakyat untuk diminta pendapatnya.
- b). Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1957 pasal 3, menyebutkan bahwa seperti dalam negara, daerahpun demikian, yakni sebelum rakyat diberi beban untuk membayar terlebih dahulu dimintakan pendapat rakyat dan mendapat persetujuan.
- c). Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1957 yaitu retribusi tidak dimaksudkan pembayaran yang dipungut oleh suatu daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dapat dianggap sebagai perusahaan.
- d). Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 1997, disebutkan bahwa retribusi hanya dapat dipungut sedemikian sehingga diperoleh keuntungan yang layak bagi daerah sedang pemungutan itu ditetapkan sesuai dengan jasa yang diberikannya. Disini berarti pemungutan tidak boleh setinggi-tingginya tetapi hanya sebagai pengganti atas jasa yang diterima.
- e). Retribusi tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya pengangkutan barang ke dalam maupun keluar daerah.

#### 4.6 Pengertian Pasar

Pengertian pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar adalah: "Tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran atau bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang". Pengertian pasar dalam definisi sederhana adalah bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya antara permintaan dan penawaran (Lincoln Arsyad, 1988:23-24).

Adapun definisi pasar adalah:

- a. Pasar adalah segenap kelompok pelataran yang sebagian beratap dan sebagian terbuka tanpa atap yang ditunjuk dengan keputusan DPRD, dimana pedagang-pedagang berkumpul menjual dagangannya.
- b. Pasar adalah tempat bangunan atau lapangan tertentu yang dipergunakan untuk usaha mempertunjukkan, memperjualbelikan, menyimpan barang dagangan atau menjalankan usaha perdagangan atau memberikan atau menawarkan jasa sebagai mata pencaharian.

Kategori fungsi pasar yang didasarkan pada besarnya pasar yang ditentukan oleh tingkat keramaian, besarnya retribusi, jangkauan pelayanan besarnya fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, keragaman komoditas, jumlah hari pasar dan sejenisnya dapat disebutkan dalam lima golongan kelas pasar (menurut UU No. 3 Tahun 1992:4), yaitu:

1. Pasar kelas 1 (pasar regional)

Pasar dengan komponen bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan memberikan pelayanan antar kota dan atau daerah belakang/pendukung dengan luas minimal 35.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di pinggiran kota atau perkotaan sekitar jalan arteri sekunder atau kolektor primer.

2. Pasar kelas 2 (pasar kota)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan berfungsi memberikan pelayanan dalam kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 13.500 m<sup>2</sup> yang berlokasi di pusat kota atau perkotaan di kawasan perdagangan/ jasa.

3. Pasar kelas 3 (pasar wilayah)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan berfungsi memberikan pelayanan bagian wilayah kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 4.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di wilayah bagian kota dalam kawasan perdagangan/jasa.

4. Pasar kelas 4 (pasar lingkungan)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang terutama di dalam bangunan berfungsi memberikan pelayanan di tingkat lingkungan dengan luas lahan minimal 500 m<sup>2</sup> yang berlokasi di lingkungan.

#### 5. Pasar kelas 5 (pasar warungan)

Pasar tanpa komponen bangunan, sistem arus barang berfungsi memberikan pelayanan di tingkat lokal yaitu perumahan atau desa dengan luas lahan kurang dari 500 m<sup>2</sup> dan lokasinya tersebar.

#### 4.7 Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran tetap maupun tidak tetap di pasar karena retribusi pasar untuk setiap daerah pemungutan, ketentuan dan peraturannya dituangkan dalam peraturan daerah untuk tiap-tiap daerah pungutan, dapat terjadi naiknya tidak sama.

Retribusi pasar adalah uang pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran baik tetap maupun tidak tetap di pasar.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Retribusi Pasar pada Bab Pasal 1 item ke 10 menyebutkan bahwa :

Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, kios, los dan halaman/pelataran yang dikelola oleh Dinas Pasar.

Adolf Waqner C. Goedhart, 1973:97 mengklasifikasikan pungutan retribusi pasar sebagai berikut:

1. Menurut sifat prestasi negara, retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan milik pemerintah. Pedagang membayar retribusi ke pemerintah daerah sebagai konsekuensi penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan.



2. Menurut cara penentuan jumlah pungutan, retribusi pasar merupakan retribusi variabel, jumlah pungutan tergantung dari kelas pasar, golongan dagangan, luas toko, petak atau gudang atau los yang digunakan serta tempat berdagang.
3. Menurut cara pembayarannya retribusi pasar termasuk retribusi kontan, pemakaian jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran tiap hari, sedangkan jasa kios melakukan pembayaran dengan sistem harian atau mingguan.

#### **4.8 Obyek Retribusi Pasar**

Obyek retribusi pasar terdiri dari:

1. Komponen utama, terdiri atas:
  - a. Lantai dasaran pada lahan.
  - b. Lantai dasaran pada toko/kios.
  - c. Lantai dasaran pada los.
  - d. Lantai dasaran luar los.
  - e. Lantai dasaran luar pasar.
  - f. Gudang .
  - g. Kandang hewan.
2. Komponen penunjang, terdiri atas:
  - a. Kamar mandi/WC.
  - b. Tempat parkir.
  - c. Tempat bongkar muat.

3. Komponen pendukung seperti tempat penitipan anak dan tempat pelayanan kesehatan.

#### **4.9 Subyek Retribusi Pasar**

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar pada Bab II Pasal 4, subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

#### **4.10 Penagihan Retribusi Pasar**

Penagihan retribusi pasar ini diatur dalam peraturan retribusi daerah, hal ini dimaksudkan agar para pembayar retribusi menyadari akan hak dan kewajibannya. Agar penarikan tagihan retribusi pasar dapat tercapai sesuai target maka baik pihak penagih atau pihak tertagih harus bisa melaksanakan hak serta kewajibannya dengan benar. Menurut Andik Fajar Tjahyono, 1996:30 penagihan retribusi meliputi:

- a. Yang kena retribusi disodorkan daftar isian agar pengenaan retribusi sesuai dengan jumlah yang mereka memang harus bayarkan.
- b. Yang kena retribusi harus memenuhi kewajibannya bila sesuai dengan yang mereka harus bayarkan.

Apabila hal tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dapat diadakan ancaman hukuman dengan hukuman paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi

yang terutang. Sebelum ancaman tersebut dijalankan terlebih dahulu diadakan pendahuluan yang meliputi:

- a. Peringatan.
- b. Teguran.
- c. Denda atau tambahan pembayaran.
- d. Penyitaan.

Menurut Adolf Wagner C. Goedhart (1973:97), ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi pada waktu memungut retribusi, yaitu:

1. Bahwa pada umumnya jasa yang dibayar dengan retribusi tersebut bermanfaat baik individu maupun masyarakat. Apabila keuntungan individu itu relatif lebih besar maka dipandang sudut pembagian beban adalah adil. Sebaliknya apabila keuntungan relatif besar bagi masyarakat maka retribusi harus ditentukan relatif lebih rendah dan sebagian besar ongkos penyediaan negara yang bersangkutan harus dibiayai oleh perpajakan.
2. Pemungutan retribusi dibenarkan selama kerugian yang ditimbulkan oleh pembatasan penggunaan jasa negara itu lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkan oleh kenaikan pajak. Apabila jasa itu lebih bermanfaat bagi masyarakat maka lebih besar juga kegunaan penurunan retribusi.

#### **4.11 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar**

Dasar hukum dalam mengadakan pemungutan retribusi sebagai sumber keuangan daerah, berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi pasar dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah pemungut, peraturan daerah tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. oleh karena itu tiap daerah pemungutan terdapat peraturan yang mengatur pemungutan retribusi pasar. Landasan hukum yang berlaku di Kabupaten Wonogiri untuk pemungutan retribusi pasar didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar.

#### **4.12 Hubungan Retribusi Pasar dengan PAD**

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan untuk mewujudkan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan baik rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 97, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

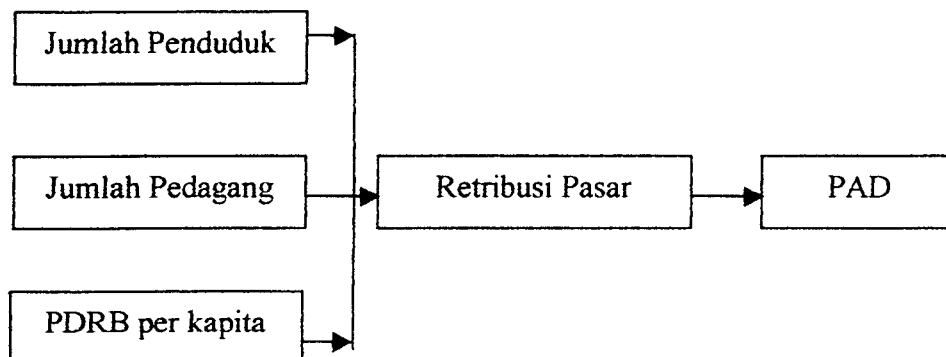
1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro.

Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah, yang mana kesemuanya terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah dan akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Retribusi pasar sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah sangat berpotensi untuk ditingkatkan mengingat peran retribusi pasar ini dalam peningkatan PAD. Retribusi pasar bisa terus diupayakan dan dimaksimalkan pemungutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan. Bila pembangunan bisa berjalan dengan lancar maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh retribusi pasar terhadap PAD maka upaya peningkatan retribusi pasar untuk menambah keuangan daerah harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

Dalam suatu penelitian, untuk memecahkan masalah lebih mudah bila berdasarkan suatu kerangka pemikiran yang sudah tersusun dan terarah pada pemecahan masalah tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat hubungan antar variabel melalui skema berikut ini:



Gambar 4.1 Skema kerangka pemikiran

Pada kerangka pemikiran terlihat adanya variabel jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang berarti akan mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Hal ini akan mengundang banyak orang melakukan usaha perdagangan, sehingga akan mendorong peningkatan jumlah kebutuhan akan tempat perdagangan, seperti los/kios, dan sebagainya. Dengan meningkatnya jumlah pedagang dan fasilitas perdagangan lainnya akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar.

Semakin besar PDRB per kapita berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat akan mendorong meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat yang berujung pada peningkatan permintaan masyarakat. Tingginya permintaan akan diimbangi dengan bertambahnya penawaran di pasar sehingga yang kemudian terjadi adalah penerimaan retribusi pasar akan meningkat.

Peningkatan penerimaan retribusi pasar akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), otomatis akan sangat berpengaruh terhadap sumber keuangan daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya.

#### **4.13 Hipotesis**

Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri berpengaruh positif, signifikan terhadap besarnya penerimaan retribusi pasar.
2. Jumlah pedagang di Kabupaten Wonogiri berpengaruh positif, signifikan terhadap besarnya penerimaan retribusi pasar.
3. PDRB per kapita di Kabupaten Wonogiri berpengaruh positif, signifikan terhadap besarnya penerimaan retribusi pasar.
4. Jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita secara bersama-sama di Kabupaten Wonogiri berpengaruh positif, signifikan terhadap besarnya penerimaan retribusi pasar.
5. Peran retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri dari tahun 1987 s/d 2001 kecenderungannya semakin meningkat.



## **BAB V**

### **METODE PENELITIAN**

#### **5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Wonogiri. Peneliti memilih daerah ini sebagai objek penelitian, karena dengan pertimbangan, selain perkembangan jasa perdagangan di Kabupaten Wonogiri relatif sangat pesat, wilayah ini memiliki banyak sumber penerimaan daerah dan berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

#### **5.2 Jenis Data**

Data yang digunakan berupa data time series dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun, yaitu mulai tahun 1987 sampai dengan 2001, meliputi:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Jumlah Pedagang
- c. PDRB per kapita
- d. PAD.

Data yang akan digunakan berupa data sekunder, diperoleh dari dokumen data Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada dinas/ instansi terkait.

#### **5.3 Definisi Variabel**

- a. Jumlah Penduduk adalah jumlah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Wonogiri.

- b. Jumlah pedagang adalah jumlah orang yang tercatat sebagai pedagang pasar di Kabupaten Wonogiri.
- c. PDRB per kapita adalah jumlah Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten Wonogiri menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku.
- d. Penerimaan retribusi pasar adalah keseluruhan penerimaan dari semua komponen retribusi pasar, yang terdiri dari retribusi sewa, fasilitas pasar, retribusi ijin sewa tempat dan pemindahan hak sewa tempat di pasar serta retribusi pasar khusus/hewan di Kabupaten Wonogiri.
- e. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5.4 Teknik Analisa Data

##### 1). Analisa Regresi

###### A. Model Empirik

Untuk menguji hipotesis maka bentuk regresi yang digunakan dalam analisis ini adalah bentuk regresi linier berganda yang didasarkan pada persebaran (*scatter plot*) dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Secara umum bentuk persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

di mana :

Y = Retribusi Pasar (rupiah),

- $X_1$  = Jumlah Penduduk (orang),  
 $X_2$  = Jumlah Pedagang (orang),  
 $X_3$  = Produk Domestik Regional Bruto per kapita (rupiah),  
 $\beta_0$  = Konstanta,  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi, dan  
 $e$  = standar error.

## B. Rencana Analisis

Pengujian ini digunakan untuk melihat signifikansi parameter yang diperoleh. dan sekaligus untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita terhadap retribusi pasar. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji F-statistik dan uji t-statistik.

### a. Uji t

Untuk membuktikan bahwa jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita secara parsial mempengaruhi retribusi pasar digunakan uji t-statistik. Adapun tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut:

#### (a) Membuat formulasi hipotesis.

- $H_0: \beta_1 = 0$  (hipotesis nihil) Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan atas variabel independen ( $X_1$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ).

- Ha:  $\beta_1 > 0$  Artinya ada pengaruh yang signifikan positif atas variabel independen ( $X_1$ ) terhadap variabel dependen (Y).
- Ha:  $\beta_1 < 0$  Artinya ada pengaruh yang signifikan negatif atas variabel independen ( $X_1$ ) terhadap variabel dependen (Y).

(b) Menentukan *level of significant* dengan t-tabel.

(c) Menghitung nilai t-statistik dengan rumus :

$$t\text{-hitung} = r_{yx}(x) = r_{y12} \sqrt{\frac{n-k-l}{1-r^2}}$$

(d) Keputusan

Ho : diterima bila t-hitung < t-tabel

Ho : ditolak bila t-hitung > t-tabel

## b. Uji F

Untuk membuktikan bahwa jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita bersama-sama mempengaruhi retribusi pasar digunakan uji F-statistik. Adapun tahapan pengujiannya sebagai berikut :

(a) Membuat formulasi hipotesis.

Ho :  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas.

Ha :  $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas.

(b) Menentukan *level of significan* dengan F-tabel.

(c) Mencari F–hitung dengan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

(d) Keputusan

Ho : diterima bila F-hitung < F-tabel.

Ha : diterima bila F-hitung > F- tabel.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

Koefisien determinasi dilambangkan dengan  $R^2$  merupakan proporsi hubungan antara Y dengan X. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.  $R^2$  dapat dinyatakan dengan bacaan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)\}^2}{\{n \sum x^2 - (n \sum x^2)\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}$$

C. Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model yang diestimasi memenuhi asumsi klasik, maka harus dipenuhi syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estmator*) yaitu :

(a) Uji Normalitas.

Menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. (Singgih Santoso, 2000: 212)

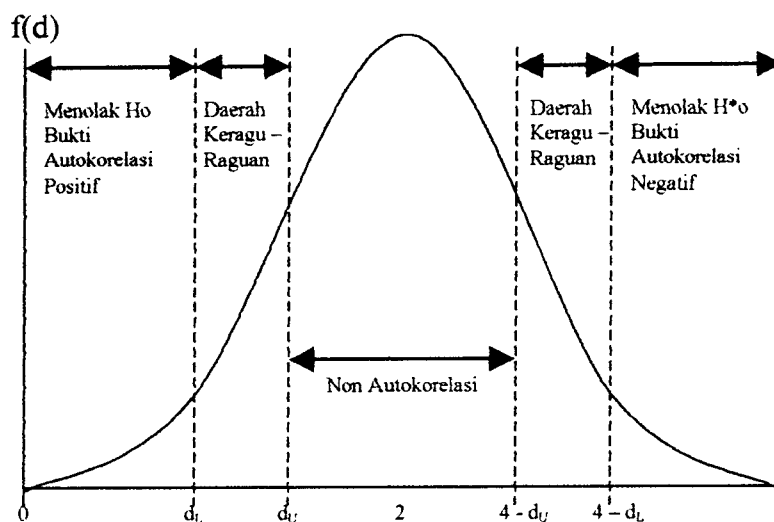
Pengujian ini dilakukan dengan mengamati histogram atas nilai residual dan grafik *normal probability plot*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan:

- i. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.
- ii. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas.

(b) Uji Autokorelasi.

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. (Gujarati, 1999 : 201).

Uji / test Autokorelasi adalah Durbin – Watson.



Legenda :

$H_0$  : Tidak ada autokorelasi positif.

$H^*o$  : Tidak ada autokorelasi negatif.

Gambar 5.1 Statistik d Durbin – Watson

Panduan mengenai angka D-W (Durbin-Watson) untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada Tabel D-W, dengan pengambilan keputusan berikut:

- i. Jika nilai  $d$  lebih rendah dari  $d_L$  atau lebih tinggi dari  $4-d_L$ , maka signifikan terdapat autokorelasi.
- ii. Jika nilai  $d$  beradda lebih besar dari  $d_U$  atau lebih kecil dari  $4-d_U$ , berarti tidak terdapat autokorelasi.
- iii. Jika nilai  $d$  berada antara  $d_U$  dan  $d_L$  atau berada diantara  $4-d_U$  dan  $4-d_L$ , maka dinyatakan sebagai daerah tidak dapat diambil kesimpulan atau ragu-ragu.

(c) Uji Heteroskedastisitas.

Menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Deteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu Y adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar pengambilan keputusan:

- i. Jika ada pola tertentu, seperti titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.
- ii. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

(d) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Uji Multikolinearitas adalah VIF (*Variances Inflation Factor*) dan *Tolerance* (Santoso, 2000: 206).



Pedoman suatu regresi yang bebas multikolinieritas adalah:

- a. Mempunyai nilai VIF di sekitar 1;
- b. Mempunyai angka *Tolerance* mendekati 1.

## 2). Analisis Ratio

Sedangkan pada hipotesa kelima, digunakan analisis ratio antara penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah adalah :

$$Q = \frac{RP}{PAD} \times 100 \%$$

Keterangan :

Q = Prosentase sumbangan pendapatan retribusi pasar terhadap PAD (%)

RP = Retribusi Pasar (rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (rupiah)

Kemudian untuk mengetahui kecenderungan peran retribusi pasar terhadap PAD, dengan melihat besarnya prosentase retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Jika terjadi kenaikan besarnya prosentase maka kecenderungannya adalah positif dan jika terjadi penurunan besarnya prosentase maka kecenderungannya adalah negatif.

## BAB VI

### ANALISIS DATA

Sebagaimana diuraikan dalam metode penelitian, landasan teori dan hipotesis, maka analisis data ini dilakukan dalam dua sub bab berikut. Sub bab pertama membahas hipotesis yang meramalkan adanya proses peningkatan pendapatan retribusi di Kabupaten Wonogiri yang akan terlihat dari signifikansi pengaruh berbagai karakteristik pasar terhadap penerimaan retribusi pasar. Analisis didasarkan pada hasil regresi yang mengukur pengaruh jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita terhadap retribusi pasar.

Sub bab kedua membahas peran retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah, bagian ini berusaha menjelaskan seberapa besar kontribusi dari retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonogiri.

#### 6.1 Pengaruh jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita terhadap retribusi pasar di Kabupaten Wonogiri.

##### 6.1.1 Analisis Regresi

Sebagaimana dikemukakan dalam metode penelitian, persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

di mana :

- Y = Retribusi Pasar (rupiah),
- X<sub>1</sub> = Jumlah Penduduk (orang),
- X<sub>2</sub> = Jumlah Pedagang (orang),

$X_3$  = Produk Domestik Regional Bruto per kapita (rupiah),

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi, dan

$e$  = standar error.

Dengan hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 6.1. Hasil regresi antara variabel independen (jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita) terhadap variabel dependen (retribusi pasar)

Variabel	Koefisien regresi	Standar error	t-statistik
Konstanta	-7069742661	799412957.8	-1.437
$X_1$ jpdk	7221.010	947.338	7.622
$X_2$ jpdg	10314.590	42843.972	4.241
$X_3$ pdrb per kapita	39.009	62.120	5.638

R-Square = 0.991

Adjusted R-Squared = 0.988

F-Statistik = 392.611

Durbin Watson = 2.015

Uji Hipotesis dari hasil regresi sebagaimana dipresentasikan pada Tabel 6.1 memberi estimasi cukup baik bila dilihat dengan membandingkan t-statistik yang diperoleh dari hasil regresi dengan t-tabel.

### 6.1.2 Uji t-statistik

Tabel. 6.2 Pengujian variabel independen dengan uji t-statistik

Variabel	t-statistik	t-tabel df(n-k)	$\alpha$	Keterangan
Konstanta	-1.437	1.7823	5 %	Tidak Signifikan
X <sub>1</sub> jpdk	7.622	1.7823	5 %	Signifikan
X <sub>2</sub> jpdg	4.241	1.7823	5 %	Signifikan
X <sub>3</sub> PDRB per kapita	5.638	1.7823	5 %	Signifikan

Sumber : Data diolah

Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel

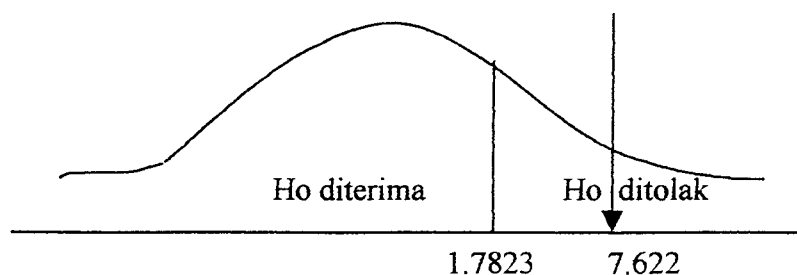
$H_0$  : ditolak bila  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

#### 6.1.2.1 Uji satu sisi parameter variabel jumlah penduduk ( $X_1$ )

Untuk variabel jumlah penduduk:  $t\text{-hitung} = 7.622$ ,  $t\text{-tabel} = 1.7823$ ,  $df = 12$ ,  $\alpha = 5\%$ . Karena  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $7.622 > 1.7823$ ), pada sisi positif maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat hubungan signifikan antara variabel jumlah penduduk dengan retribusi pasar. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif, signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar terbukti.

Gambar 6.1

Uji satu sisi parameter variabel jumlah penduduk

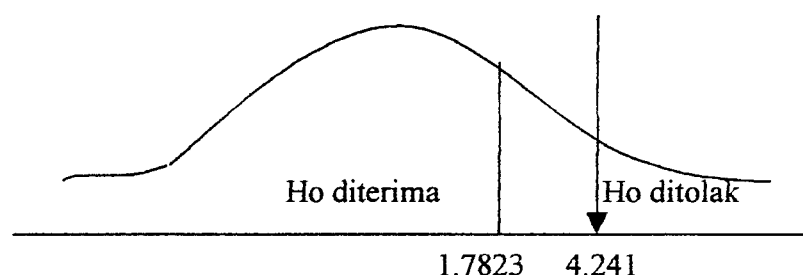


### 6.1.2.2 Uji satu sisi parameter variabel jumlah pedagang ( $X_2$ )

Untuk variabel jumlah pedagang:  $t\text{-hitung} = 4.241$ ,  $t\text{-tabel} = 1.7823$ ,  $df = 12$ ,  $\alpha = 5\%$ . Karena  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $4.241 > 1.7823$ ), pada sisi positif maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat hubungan signifikan antara variabel jumlah pedagang dengan retribusi pasar. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel jumlah pedagang berpengaruh positif, signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar terbukti.

Gambar 6.2

Uji satu sisi parameter variabel jumlah pedagang

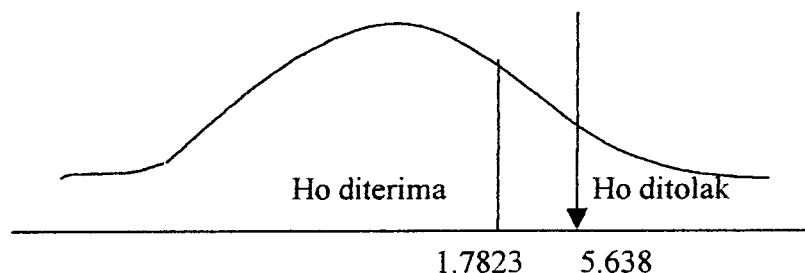


### 6.1.2.3 Uji satu sisi parameter variabel PDRB per kapita ( $X_3$ )

Untuk variabel PDRB:  $t\text{-hitung} = 5.638$ ,  $t\text{-tabel} = 1.7823$ ,  $df = 12$ ,  $\alpha = 5\%$ . Karena  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $5.638 > 1.7823$ ), pada sisi positif maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti terdapat hubungan signifikan antara variabel PDRB per kapita dengan retribusi pasar. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh positif, signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar terbukti.

Gambar 6.3

Uji satu sisi parameter variabel PDRB per kapita



### 6.1.3 Uji F statistik

Hipotesis yang diuji dalam uji F.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , berarti jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita tidak tepat untuk menjelaskan retribusi pasar.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , berarti jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita secara bersama tepat sebagai penjelas retribusi pasar.

$H_0$  : ditolak bila  $F - \text{hitung} > F - \text{tabel}$ .

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 392.611. Oleh karena F hitung  $> F$  tabel = 3.4903 ( $df = 12, \alpha = 5\%$ ), maka Hipotesis nol ditolak atau Hipotesis alternatif diterima, sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi retribusi pasar. Atau dapat dikatakan, jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap retribusi pasar.

### 6.1.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

Angka R square adalah sebesar 0,991. Hal ini berarti 99,1 % variasi retribusi pasar dapat dijelaskan oleh variasi variabel jumlah penduduk, jumlah

pedagang dan PDRB per kapita. Sedangkan sisanya sebesar 0,9 % (100% - 99,1%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Dari hasil regresi pada tabel 6.1 di atas diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = - 7069742661 + 7221.010 X_1 + 10314.590 X_2 + 39.009 X_3 + e$$

Koefisien dari masing-masing variabel tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut:

- a). Konstanta sebesar – 7069742661 menyatakan bahwa jika tidak penduduk atau pedagang yang datang melakukan aktivitas jual beli di pasar, sekaligus tidak adanya kontrol Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita maka retribusi pasar Kabupaten Wonogiri, akan berkurang Rp. 7.069.742.661,-
- b). Koefisien regresi  $X_1$  sebesar 7221.010 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) orang penduduk akan meningkatkan retribusi pasar sebesar Rp. 7.221,010,- tiap tahunnya.
- c). Koefisien regresi  $X_2$  sebesar 10314.590 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) orang pedagang akan meningkatkan retribusi pasar sebesar Rp. 10.314,590,-.tiap tahunnya.
- d). Koefisien regresi  $X_3$  sebesar 39.009 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp.1,- (satu rupiah) PDRB per kapita akan meningkatkan retribusi pasar sebesar Rp. 39,009,-.tiap tahunnya.

### 6.1.5 Uji Asumsi Klasik

#### a) Uji Normalitas

Analisis dari grafik normalitas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi rertribusi pasar berdasar masukan variabel independen.

#### b) Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan komputer dengan menggunakan metode penyesuaian parsial yang memuat kelambanan dari variabel dependennya, menghasilkan nilai dari Durbin Watson sebesar 2.015 pada  $\alpha = 5\%$ .

Nilai tabel DW untuk  $d_l(\alpha, k, n) = (0.05, 3, 15) = 0.82$

Nilai tabel DW untuk  $d_u(\alpha, k, n) = (0.05, 3, 15) = 1.75$

Keterangan:

$k$  = Jumlah variabel independen

$n$  = Jumlah pengamatan

Panduan mengenai angka D-W (Durbin-Watson) untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada Tabel D-W, dengan pengambilan keputusan berikut:

- a. Jika nilai  $d$  lebih rendah dari  $d_l$  atau lebih tinggi dari  $4-d_l$ , maka signifikan terdapat autokorelasi.
- b. Jika nilai  $d$  beradda lebih besar dari  $d_u$  atau lebih kecil dari  $4-d_u$ , berarti tidak terdapat autokorelasi.



- c. Jika nilai  $d$  berada antara  $d_u$  dan  $d_l$  atau berada diantara  $4-d_u$  dan  $4-d_l$ , maka dinyatakan sebagai daerah tidak dapat diambil kesimpulan atau ragu-ragu.

Gambar 6.4  
Hasil Analisis Statistik  $d$  Durbin–Watson

Autokorelasi +	Daerah ragu-ragu	Tidak terdapat autokorelasi (Non Autokorelasi)	Daerah ragu-ragu	Autokorelasi -
$d_l$	$d_u$	$d$	$4-d_u$	$4-d_l$
0.82	1.75	2.015	2.25	3.18

Dari gambar 6.4 terlihat nilai uji Durbin Watson terletak pada daerah tidak terdapat autokorelasi (non autokorelasi), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai uji analisa autokorelasi sebesar 2.015, berarti tidak terdapat autokorelasi atau tidak mengindikasikan adanya autokorelasi antar ruang (*spatial autocorrelation*).

### c) Uji Heteroskedastisitas

Deteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu Y adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

Dengan dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Hasil analisis statistik dari grafik uji heteroskedastisitas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi redistribusi pasar berdasar masukan variabel independennya.

d) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah VIF (*Variances Inflation Factor*) dan *Tolerance* (Santoso, 2000: 206).

Pedoman suatu regresi yang bebas multikolinieritas adalah :

- a. Mempunyai nilai VIF di sekitar 1.
- b. Mempunyai angka *Tolerance* mendekati 1.

Dari hasil perhitungan statistik pada bagian COEFFICIENT terlihat untuk ketiga variabel independen, angka VIF ada di sekitar angka 1 untuk jumlah penduduk = 1.253, jumlah pedagang = 1.012 dan PDRB per kapita = 1.115. Demikian juga nilai *Tolerance* mendekati 1, seperti terlihat untuk jumlah penduduk = 0.917, jumlah pedagang = 0.932 dan PDRB per kapita = 0.901. Sehingga dalam model regresi di atas, tidak menunjukkan adanya problem multikolinieritas.

## 6.2 Peran Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ratio retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Wonogiri dari tahun 1987 sampai dengan 2001 selalu mengalami perkembangan, ratio ini dapat digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesiapan pemerintah Kabupaten dalam otonomi daerah pada saat ini, disamping itu juga untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten terhadap pemerintah pusat.

Analisis ratio digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan/kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Wonogiri, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindakan/kebijaksanaan apa yang harus lebih diperhatikan dalam rangka memacu peningkatan penerimaan retribusi pasar sebagai upaya peningkatan perannya terhadap PAD.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan retribusi pasar terhadap PAD, menggunakan kontribusi yang merupakan ratio antara jumlah retribusi pasar dengan PAD dikalikan 100%. Retribusi pasar sebagai komponen PAD memberikan peranan atau kontribusi terhadap retribusi daerah cukup besar atau berarti. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.3. Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun 1987 sampai dengan 2001 di Kabupaten Wonogiri.

No	Tahun	PAD (rupiah)	Retribusi Pasar (rupiah)	Kenaikan per tahun (%)	Ratio (%)
1.	1987	1526466289	217720874	-	14.26
2.	1988	2145936636	335019896	53	15.61
3.	1989	2751853308	370000000	10	13.44
4.	1990	3446285853	377659547	2	10.96
5.	1991	3912234778	435759882	15	11.14
6.	1992	3977464630	480950418	10	12.09
7.	1993	4739718799	552964387	14	11.67
8.	1994	6380427519	605540995	9	9.49
9.	1995	7424813831	663398131	9	8.93
10.	1996	7861891754	767754840	15	9.76
11.	1997	9167626754	825923725	7	9.01
12.	1998	9889354449	840520925	2	8.50
13.	1999	10839962818	891727515	6	8.23
14.	2000	10366132087	975629350	9	9.41
15.	2001	14224173000	1053679690	8	7.41

Sumber: Kabupaten Wonogiri Dalam Angka Tahun 1987 s/d 2001, Bappeda dan BPS Kabupaten Wonogiri. (diolah).

Melihat tabel di atas diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar tahun 1987 sampai dengan 2001, telah memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap PAD dengan kondisi selalu terjadi kenaikan pada tiap tahunnya, biarpun dengan kondisi yang fluktuatif. Terjadi kenaikan besar yaitu 53 % pada tahun 1988, dan kenaikan 15% pada tahun 1991 dan 1996 tetapi pada tahun-tahun berikutnya hanya terjadi kenaikan  $\leq 10\%$ .

Pendapatan dari retribusi pasar yang selalu meningkat, biarpun disatu sisi perbandingannya rendah dengan PAD, yang terlihat dari ratio yang ada, dimungkinkan PAD pada saat itu rendah karena pendapatan dari sektor di luar retribusi pasar yang relatif kurang.

Ratio atau prosentase sumbangan pendapatan retribusi pasar terhadap PAD dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2001 dengan nilai rata-rata sebesar 9,977 %, terjadi ratio sumbangan pendapatan retribusi pasar terhadap PAD yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada hasil yang cukup baik dari investasi yang ditanamkan. Hasil ini akan masih dapat ditingkatkan lagi dengan memperbanyak obyek pasar yang mulai dikembangkan dengan penarikan retribusi pasar. Melihat peningkatan prosentasenya terhadap PAD tersebut berarti retribusi pasar mempunyai peran yang cukup berarti pada peningkatan PAD di Kabupaten Wonogiri.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

Keseluruhan hasil analisis data penelitian, disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Hal ini menggambarkan bahwa, meningkatnya jumlah penduduk, akan mendorong terciptanya perubahan kondisi pasar yang lebih baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga mengakibatkan nilai investasi disekitarnya juga akan semakin meningkat.
- b. Jumlah pedagang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Hal ini menggambarkan bahwa, meningkatnya jumlah pedagang, akan terciptanya perubahan kondisi pasar yang lebih secara kuantitas, sehingga mengakibatkan nilai investasi dan pendapatan disekitarnya juga akan semakin meningkat.
- c. PDRB per kapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Hal ini menggambarkan bahwa struktur ekonomi daerah mempunyai peranan penting dalam kebijakan fiskal, sehingga apabila perekonomian tumbuh dengan baik, derajat perekonomian masyarakat pelaku ekonomi akan semakin baik sehingga mempunyai kecenderungan untuk

memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah dengan melakukan aktivitas jual beli dari kelebihan penghasilannya.

- d. Dari uji F test, didapat F hitung adalah 392.611. Oleh karena F hitung > F tabel = 3.4903 (df = 12,  $\alpha$  = 5 %), sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi retribusi pasar. Atau dapat dikatakan, jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap retribusi pasar.
- e. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,991, menunjukkan besarnya proporsi sumbangan variabel jumlah penduduk, jumlah pedagang dan PDRB per kapita sebesar 99,1 % terhadap retribusi pasar. Sedangkan sisanya sebesar 0,9 % dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.
- f. Hasil kajian uji asumsi klasik dari seluruh variabel yang diuji, dengan menggunakan test uji normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinieritas semuanya tidak menunjukkan adanya problem, berarti model regresi layak dipakai untuk prediksi retribusi pasar berdasar masukan variabel independennya.
- g. Hasil analisis ratio, menunjukkan retribusi pasar telah memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap PAD. Hasil ini akan masih dapat ditingkatkan lagi dengan memperbanyak obyek retribusi yang mulai dikembangkan dalam pasar. Melihat peningkatan prosentase yang terjadi

berarti retribusi pasar mempunyai peran yang cukup berarti pada peningkatan PAD di Kabupaten Wonogiri.

## 7.2 Saran

- a. Peningkatan tarif retribusi pasar harus diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pasar, sehingga para pedagang dapat merasakan manfaatnya, kebersihannya, ketertiban serta keamanan di pasar perlu ditingkatkan untuk menarik para pembeli. Dengan semakin banyaknya pembeli maka pendapatan pedagang akan meningkat, sehingga para pedagang disaat akan membayar retribusi pasar, akan membayar dengan senang hati.
- b. Untuk menunjang efektifitas kerja, maka hendaknya petugas lapangan lebih serius lagi dalam mengelola retribusi pasar tersebut agar Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan lagi. Serta senantiasa membina hubungan kerja sama yang baik dengan para pedagang sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal.
- c. Penetapan target retribusi pasar untuk tahun-tahun mendatang mengacu pada perhitungan potensi yang dimiliki oleh obyek retribusi pasar, memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan mempertimbangkan secara cermat hambatan yang belum bisa dicarikan jalan keluarnya dalam pemungutan retribusi pasar, sehingga target yang ditetapkan merupakan target realistis.



d. Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi pasar sesuai dengan target yang ada dapat dilakukan dengan cara:

- 1). Menerapkan sanksi hukum kepada pemilik kios yang tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan.
- 2). Meningkatkan kegiatan pemeriksaan di lapangan agar dapat menjaring para wajib retribusi baru yang belum dikenai pemungutan sebelumnya.
- 3). Memberikan penyuluhan secara intensif terhadap para pedagang tentang hak dan kewajiban bagi para pedagang itu sendiri maupun bagi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Manajerial : Penerapan Ekonomi Mikro Dalam Manajemen Bisnis*. BPFE Yogyakarta, 1988.
- Azhari, A. Samudra, *Perpajakan Di Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Bappeda Kabupaten Wonogiri, *Penelitian Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri*, 2000.
- \_\_\_\_\_, dan BPS Kabupaten Wonogiri, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonogiri*, 1987 s/d 2001.
- \_\_\_\_\_, *Kabupaten Wonogiri Dalam Angka*, 1987 s/d 2001.
- Deddy Supriady Bratakusumah, dan Dadang, Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001.
- Eugene, Liliawati Mulyono, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasar*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 1992.
- Gujarati, Damodar, *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain, Gelora Aksara Pratama, 1999.
- Halim, Abdul, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, 2000.
- Mulyani, Sri, Maria, Imaculata, *Analisis Peranan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri)*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, STIE Kerja Sama, Yogyakarta, 1995.
- Munawir, *Perpajakan*, Edisi Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, *Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah*, 1999.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri, *Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001, Tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri*, 2001.

\_\_\_\_\_, *Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 278 Tahun 2001 Tanggal 25 Mei 2001, Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri*, 2001.

Salim, Agus Nasution, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Penerbit P dan K, Universitas Terbuka, 1986.

Santoso, Singgih, *SPSS Statistik Parametrik*, PT. Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.

\_\_\_\_\_, *Mengolah Data Statistik Secara Profesional dengan Program SPSS versi 10*, PT Elex Media Komputindo, Gramedia Jakarta, 2001.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995.

Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan praktek*, edisi 4 BPFE, Yogyakarta, 1987.

\_\_\_\_\_, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta, 2002.

Soetrisno, PH., *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit UGM, Yogyakarta, 1981.

Tjahyono, Andik Fajar, *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Tesis, Tidak Dipublikasikan, Pascasarjana UGM, 1996.

Undang-Undang, Nomor 1 Darurat Tahun 1957, *Tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah oleh Pemerintah*, Jakarta, 1957.

\_\_\_\_\_, Nomor 5 Tahun 1974, *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Jakarta. 1974.

\_\_\_\_\_, Nomor 18 Tahun 1997, *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, 1997.

\_\_\_\_\_, Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*, Jakarta, 1999.

\_\_\_\_\_, Nomor 25 Tahun 1999, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta, 1999.

\_\_\_\_\_, Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 1997, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta, 2000.

Wagner C.Goedhart, Adolf (Terjemahan Ratmoko), *Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit Jambatan, 1973.

Widayatto, Sri Wahyu, *Peran Retribusi Rekreasi Obyek Wisata Gajah Mungkur Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri. 1988-2001*, Tesis, Tidak Dipublikasikan, Pascasarjana MM – UMS, 2002.

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

	tahun	y_rp	x1_pddk	x2_pdg	x3_pdrb
1	1987	217720874	1008662	6360	289663
2	1988	335019896	1014282	6436	322664
3	1989	370000000	1018625	6520	374668
4	1990	377659547	1025964	6645	426001
5	1991	435759882	1033759	6786	489640
6	1992	480950418	1039118	6985	587453
7	1993	552964387	1047460	7105	595059
8	1994	605540995	1053657	7357	724396
9	1995	663398131	1060829	7552	841623
10	1996	767754840	1080998	7877	982423
11	1997	825923725	1087645	8828	1081111
12	1998	840520925	1095042	8966	1603375
13	1999	891727515	1103073	9459	1864024
14	2000	975629350	1111197	9623	2063170
15	2001	1053679690	1117869	10301	2245387

Keterangan :

rp = Retribusi Pasar (rupiah),

pddk = Jumlah Penduduk (orang),

pdg = Jumlah Pedagang (orang),

pdrb = Produk Domestik Regional Bruto per kapita (rupiah),

Diagram 2 Hasil Regresi

Regression by Erna Dwi Hastuti - FE - UII

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Retribusi Pasar	6.26E+08	257015284.03	15
Jumlah Penduduk	1059878.7	37010.622	15
Jumlah Pedagang	7786.67	1311.758	15
PDRB Per kapita	966043.80	663382.499	15

**Correlations**

		Retribusi Pasar	Jumlah Penduduk	Jumlah Pedagang	PDRB Per kapita
Pearson Correlation	Retribusi Pasar	1.000	.995	.969	.944
	Jumlah Penduduk	.995	1.000	.977	.955
	Jumlah Pedagang	.969	.977	1.000	.983
	PDRB Per kapita	.944	.955	.983	1.000
Sig. (1-tailed)	Retribusi Pasar	.	.000	.000	.000
	Jumlah Penduduk	.000	.	.000	.000
	Jumlah Pedagang	.000	.000	.	.000
	PDRB Per kapita	.000	.000	.000	.
	Retribusi Pasar	15	15	15	15
	Jumlah Penduduk	15	15	15	15
	Jumlah Pedagang	15	15	15	15
	PDRB Per kapita	15	15	15	15

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
	PDRB Per kapita, Jumlah Penduduk, Jumlah Pedagang <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Retribusi Pasar

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.995 <sup>a</sup>	.991	.988	27890897.513	2.015

a. Predictors: (Constant), PDRB Per kapita, Jumlah Penduduk, Jumlah Pedagang

b. Dependent Variable: Retribusi Pasar

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	9.16E+17	3	3.0541E+17	392.611	.000 <sup>a</sup>
Residual	8.56E+15	11	7.7790E+14		
Total	9.25E+17	14			

- a. Predictors: (Constant), PDRB Per kapita, Jumlah Penduduk, Jumlah Pedagang  
 b. Dependent Variable: Retribusi Pasar

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-7069742661	799412957.8		-1.437	.000		
Jumlah Penduduk	7221.010	947.338	1.040	7.622	.000	.917	1.253
Jumlah Pedagang	10314.590	42843.972	.053	4.241	.014	.932	1.012
PDRB Per kapita	39.009	61.120	-.101	5.638	.036	.901	1.115

- a. Dependent Variable: Retribusi Pasar

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pedagang	PDRB Per kapita
1		3.790	1.000	.00	.00	.00	.00
2		.210	4.249	.00	.00	.00	.04
3		.418	18.881	.03	.00	.56	.96
4		.812	24.128	.97	1.00	.44	.01

- a. Dependent Variable: Retribusi Pasar

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
redicted Value	268116848	1.021E+09	626283345	255823469.179	15
esidual	-50395976	32619348.0	.00	24722638.273	15
std. Predicted Value	-1.400	1.543	.000	1.000	15
std. Residual	-1.807	1.170	.000	.886	15

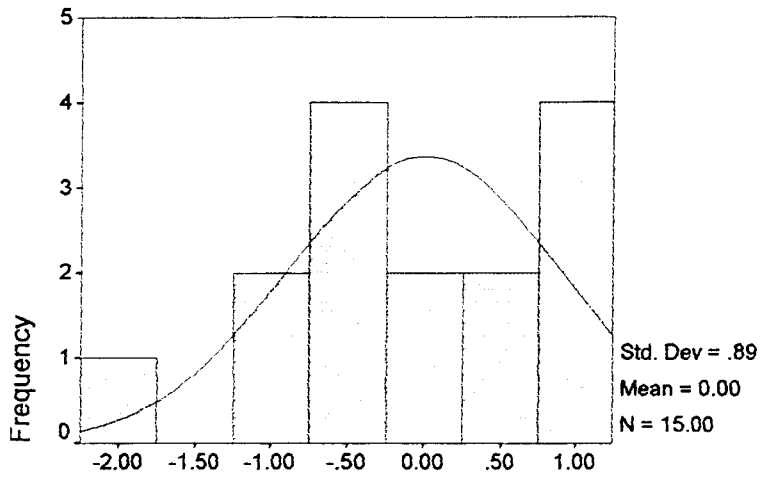
- a. Dependent Variable: Retribusi Pasar



irts

### Histogram

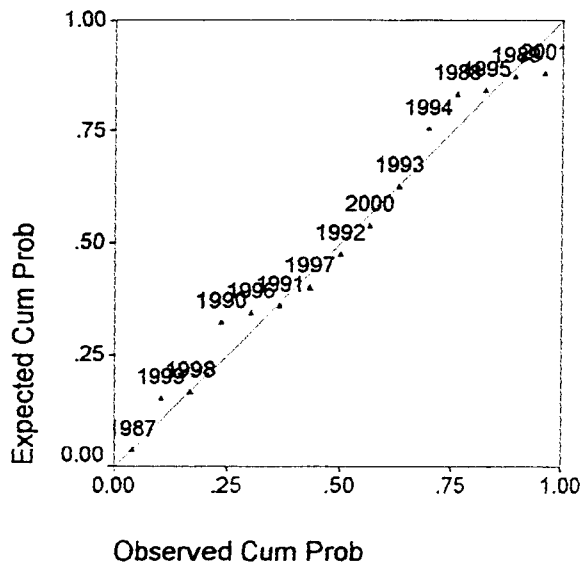
Dependent Variable: Retribusi Pasar



Regression Standardized Residual

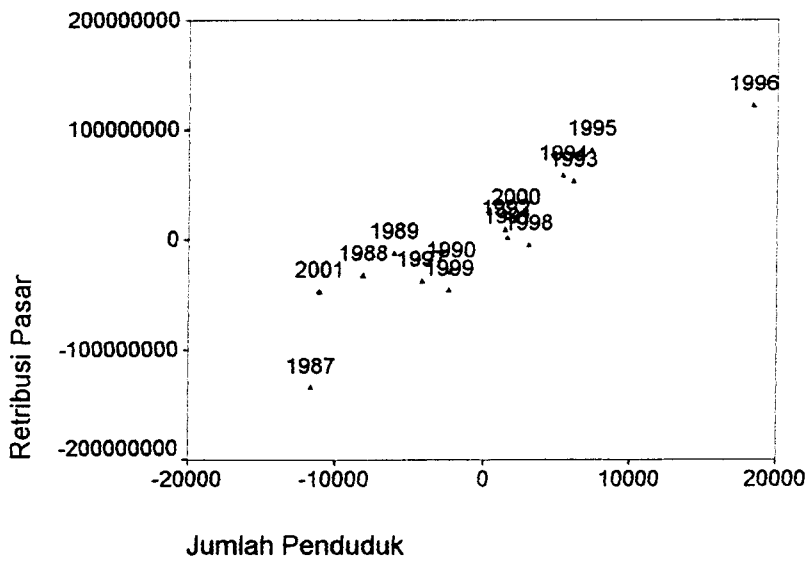
### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Retribusi Pasar



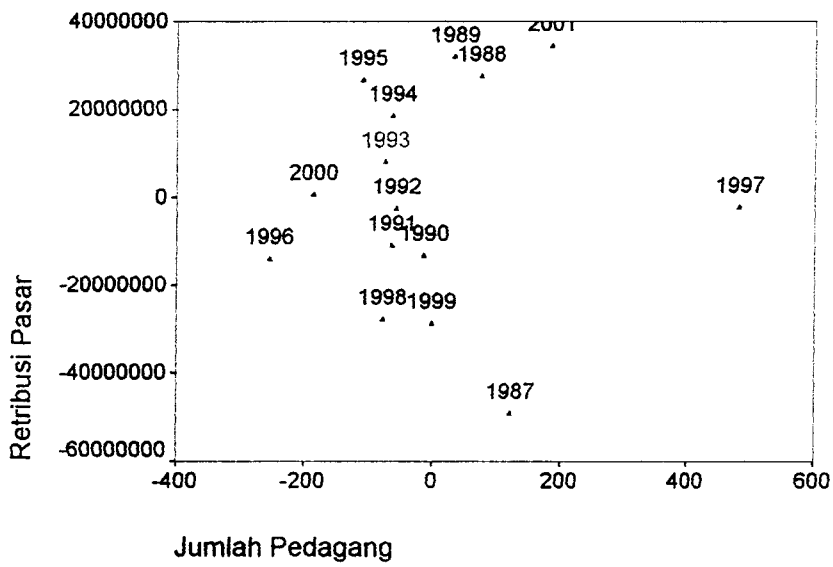
### Partial Regression Plot

Dependent Variable: Retribusi Pasar



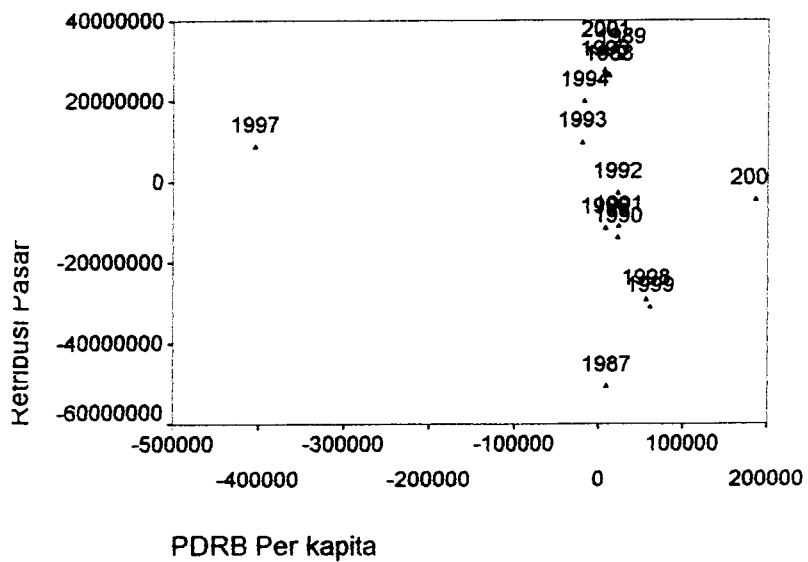
### Partial Regression Plot

Dependent Variable: Retribusi Pasar



# Partial Regression Plot

Dependent Variable: Retribusi Pasar



**heteroskedastisitas - Erna - FE - UII - 2005**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Retribusi Pasar	6.26E+08	257015284.03	15
Jumlah Penduduk	1059878.7	37010.622	15
Jumlah Pedagang	7786.67	1311.758	15
MRB Per kapita	966043.80	663382.499	15

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

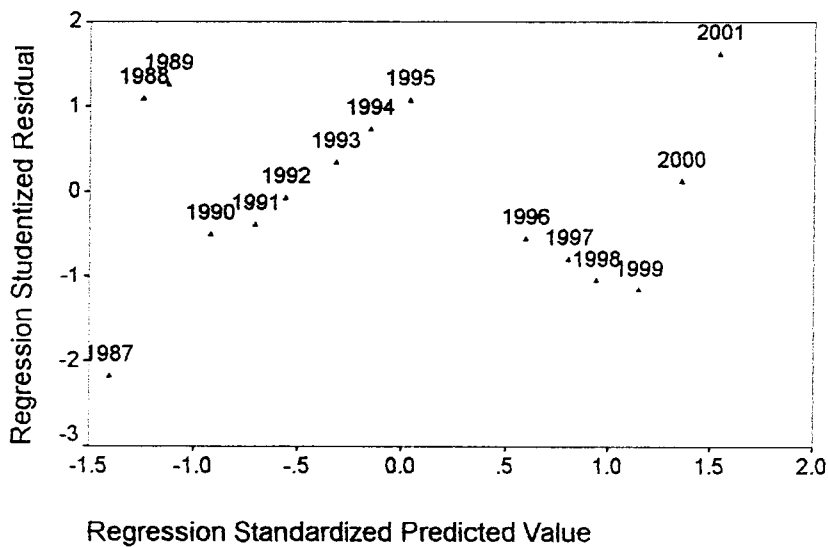
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Unadjusted Predicted Value	2.68E+08	1.02E+09	6.26E+08	255823469.18	15
Adjusted Predicted Value	-1.400	1.543	.000	1.000	15
Standard Error of Unadjusted Predicted Value	8720986.0	26421902	13572804	4987795.587	15
Adjusted Predicted Value	2.91E+08	9.92E+08	6.30E+08	256926228.20	15
Unadjusted Residual	-50395976	32619348	.00	24722638.273	15
Adjusted Residual	-1.807	1.170	.000	.886	15
Unadjusted Deleted Residual	-2.179	1.613	-.032	1.059	15
Adjusted Deleted Residual	-73288432	62065900	-3790355	38951981.461	15
Unadjusted Deleted Residual	-2.756	1.760	-.056	1.168	15
Mahalanobis Distance	.435	11.631	2.800	3.015	15
Cook's Distance	.000	1.387	.198	.378	15
Centered Leverage Value	.031	.831	.200	.215	15

a. Dependent Variable: Retribusi Pasar

**Plots**

**Scatterplot**

Dependent Variable: Retribusi Pasar



Tabel t

	df	t <sub>0.01</sub>	t <sub>0.025</sub>	t <sub>0.05</sub>	t <sub>0.1</sub>	t <sub>0.25</sub>
1	1	31.8205	12.7062	6.3138	3.0777	1.0000
2	2	6.9646	4.3027	2.9200	1.8856	.8165
3	3	4.5407	3.1824	2.3534	1.6377	.7649
4	4	3.7469	2.7764	2.1318	1.5332	.7407
5	5	3.3649	2.5706	2.0150	1.4759	.7267
6	6	3.1427	2.4469	1.9432	1.4398	.7176
7	7	2.9980	2.3646	1.8946	1.4149	.7111
8	8	2.8965	2.3060	1.8595	1.3968	.7064
9	9	2.8214	2.2622	1.8331	1.3830	.7027
10	10	2.7638	2.2281	1.8125	1.3722	.6998
11	11	2.7181	2.2010	1.7959	1.3634	.6974
12	12	2.6810	2.1788	1.7823	1.3562	.6955
13	13	2.6503	2.1604	1.7709	1.3502	.6938
14	14	2.6245	2.1448	1.7613	1.3450	.6924
15	15	2.6025	2.1314	1.7531	1.3406	.6912
16	16	2.5835	2.1199	1.7459	1.3368	.6901
17	17	2.5669	2.1098	1.7396	1.3334	.6892
18	18	2.5524	2.1009	1.7341	1.3304	.6884
19	19	2.5395	2.0930	1.7291	1.3277	.6876
20	20	2.5280	2.0860	1.7247	1.3253	.6870
21	21	2.5176	2.0796	1.7207	1.3232	.6864
22	22	2.5083	2.0739	1.7171	1.3212	.6858
23	23	2.4999	2.0687	1.7139	1.3195	.6853
24	24	2.4922	2.0639	1.7109	1.3178	.6848
25	25	2.4851	2.0595	1.7081	1.3163	.6844
26	26	2.4786	2.0555	1.7056	1.3150	.6840
27	27	2.4727	2.0518	1.7033	1.3137	.6837
28	28	2.4671	2.0484	1.7011	1.3125	.6834
29	29	2.4620	2.0452	1.6991	1.3114	.6830
30	30	2.4573	2.0423	1.6973	1.3104	.6828
31	31	2.4528	2.0395	1.6955	1.3095	.6825
32	32	2.4487	2.0369	1.6939	1.3086	.6822
33	33	2.4448	2.0345	1.6924	1.3077	.6820
34	34	2.4411	2.0322	1.6909	1.3070	.6818
35	35	2.4377	2.0301	1.6896	1.3062	.6816
36	36	2.4345	2.0281	1.6883	1.3055	.6814
37	37	2.4314	2.0262	1.6871	1.3049	.6812
38	38	2.4286	2.0244	1.6860	1.3042	.6810
39	39	2.4258	2.0227	1.6849	1.3036	.6808
40	40	2.4233	2.0211	1.6839	1.3031	.6807

	df_2	df1_1	df1_2	df1_3	df1_4	df1_5	df1_6
1	1	161.4476	199.5000	215.7073	224.5833	230.1619	233.9860
2	2	18.5128	19.0000	19.1643	19.2468	19.2964	19.3295
3	3	10.1280	9.5521	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406
4	4	7.7086	6.9443	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631
5	5	6.6079	5.7861	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503
6	6	5.9874	5.1433	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839
7	7	5.5914	4.7374	4.3468	4.1203	3.9715	3.8660
8	8	5.3177	4.4590	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806
9	9	5.1174	4.2565	3.8625	3.6331	3.4817	3.3738
10	10	4.9646	4.1028	3.7083	3.4780	3.3258	3.2172
11	11	4.8443	3.9823	3.5874	3.3567	3.2039	3.0946
12	12	4.7472	3.8853	3.4903	3.2592	3.1059	2.9961
13	13	4.6672	3.8056	3.4105	3.1791	3.0254	2.9153
14	14	4.6001	3.7389	3.3439	3.1122	2.9582	2.8477
15	15	4.5431	3.6823	3.2874	3.0556	2.9013	2.7905
16	16	4.4940	3.6337	3.2389	3.0069	2.8524	2.7413
17	17	4.4513	3.5915	3.1968	2.9647	2.8100	2.6987
18	18	4.4139	3.5546	3.1599	2.9277	2.7729	2.6613
19	19	4.3807	3.5219	3.1274	2.8951	2.7401	2.6283
20	20	4.3512	3.4928	3.0984	2.8661	2.7109	2.5990
21	21	4.3248	3.4668	3.0725	2.8401	2.6848	2.5727
22	22	4.3009	3.4434	3.0491	2.8167	2.6613	2.5491
23	23	4.2793	3.4221	3.0280	2.7955	2.6400	2.5277
24	24	4.2597	3.4028	3.0088	2.7763	2.6207	2.5082
25	25	4.2417	3.3852	2.9912	2.7587	2.6030	2.4904
26	26	4.2252	3.3690	2.9752	2.7426	2.5868	2.4741
27	27	4.2100	3.3541	2.9604	2.7278	2.5719	2.4591
28	28	4.1960	3.3404	2.9467	2.7141	2.5581	2.4453
29	29	4.1830	3.3277	2.9340	2.7014	2.5454	2.4324
30	30	4.1709	3.3158	2.9223	2.6896	2.5336	2.4205
31	31	4.1596	3.3048	2.9113	2.6787	2.5225	2.4094
32	32	4.1491	3.2945	2.9011	2.6684	2.5123	2.3991
33	33	4.1393	3.2849	2.8916	2.6589	2.5026	2.3894
34	34	4.1300	3.2759	2.8826	2.6499	2.4936	2.3803
35	35	4.1213	3.2674	2.8742	2.6415	2.4851	2.3718
36	36	4.1132	3.2594	2.8663	2.6335	2.4772	2.3638
37	37	4.1055	3.2519	2.8588	2.6261	2.4696	2.3562
38	38	4.0982	3.2448	2.8517	2.6190	2.4625	2.3490
39	39	4.0913	3.2381	2.8451	2.6123	2.4558	2.3423
40	40	4.0847	3.2317	2.8387	2.6060	2.4495	2.3359
41	50	4.0343	3.1826	2.7900	2.5572	2.4004	2.2864
42	100	3.9361	3.0873	2.6955	2.4626	2.3053	2.1906
43	200	3.8884	3.0411	2.6498	2.4168	2.2592	2.1441



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jalan Pemuda I / 26 Telepon (0273) 321131, Fax. 322102  
W O N O G I R I 57612

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : 072/S/149/2004

- I. Dasar : Surat Rekomendasi Research/Survey dari Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Wonogiri Nomor : 072/508 tanggal 31 Juli 2004.
- II. Dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri (BAPPEDA) atas nama Bupati Wonogiri menyatakan tidak keberatan atas dilaksanakannya Research/survey di Kabupaten Wonogiri, oleh :
1. Nama : **ERNA DWI HASTUTI**
  2. Pekerjaan : Mahasiswa
  3. A l a m a t : Jl. Raya Giriwono No. 10 Wonogiri.
  4. Penanggung Jawab : Drs. Suwarsono Muhammad, MA
  5. Maksud tujuan : Untuk mengadakan penelitian dalam rangka pembuatan Research / Survey skripsi dengan judul :  
" ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DAN PERANANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI (Tahun 1990 – 2002) "
  6. Lokasi : - Dinas Pasar Kabupaten Wonogiri.  
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
  7. Peserta : --
- III. Surat ijin ini berlaku tanggal, 1 Juli 2004 s/d 31 Agustus 2004.

Dengan ketentuan :

- a. Pelaksanaan Research/Survey tidak boleh dilaksanakan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- b. Sebelum melaksanakan Research/Survey supaya melapor diri kepada Pejabat-pejabat Daerah yang bersangkutan.
- c. Setelah Research/Survey selesai supaya memberikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Wonogiri.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Dikeluarkan di Wonogiri, 31 Juli 2004.

BAPPEDA KABUPATEN  
WONOGIRI  
Kepala Bidang Litbang  
**BAPPEDA**  
*[Signature]*  
**Drs. PONTJO MARDIJONO**  
Pembina  
NIP. 500 095 280

**TEMBUSAN :**

1. Kakan. Kesbang dan Linmas Kab. Wonogiri;
2. Kakan. Satpol PP Kabupaten Wonogiri;
3. Kasat. Intelpam Polres Wonogiri;
4. Kepala Dinas Pasar Kab. Wonogiri;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kab. Wonogiri;
6. Yang bersangkutan.